

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa : pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik misalnya, penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat. (Nahmati, 2018).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi *Single Entry* dan *Cash Basis* menjadi Sistem Akuntansi *Double Entry* dan *Accrual Basis*. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. (Haryanto, 2015).

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2013). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar, karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk

itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai Analisis Rasio Keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya Puput Risky Pramita (2015) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%,

Kemudian Joko Pramono (2014) menyatakan bahwa Kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44% (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%.

Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR 14 sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011). Fitri Umi Hanik, Tutik Dwi Karyanti (2014) menyatakan bahwa Rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rerata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. Debt service coverage ratio sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Jusmawati (2011) menyatakan bahwa rasio kemandirian, rasio efektivitas, berpengaruh terhadap signifikan terhadap efisiensi PAD dari tahun 2003-2010 terbukti dari probabilitas $0,009 < 0,05$. Secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Namun rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2018-2022.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut : Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2018-2022 berdasarkan analisis rasio keuangan

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada Tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada Tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada Tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Keserasian?
4. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada Tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selama tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efektivitas.
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selama tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selama tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selama tahun 2018-2022 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah wawasan keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

- 1) Bagi peneliti untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.